
Strategi Pertahanan Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara

Septianis Afipah¹, Diyah Pitaloka Rizki², Dina³

^{1,2,3}Universitas Al Ghifari, Indonesia

Email Correspondence : septianisafipah1990@gmail.com

Kata Kunci :

Strategi,
Pertahanan, Smart
Power, Asia
Tenggara

Abstrak

Pertahanan negara berfungsi sebagai instrumen utama untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki sejarah konflik perbatasan dan ketegangan politik-keamanan, meskipun jarang terjadi eskalasi militer terbuka, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam merumuskan strategi pertahanan yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan Indonesia dalam konteks dinamika kawasan Asia Tenggara, dengan menyoroti pendekatan yang diambil untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi pertahanan smart power, yang menggabungkan kekuatan militer (hard power) dengan diplomasi dan pembangunan institusi (soft power). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada modernisasi militer, tetapi juga pada pengembangan kemitraan strategis dan penguatan kerjasama regional.

Keywords :

Strategy, Defense,
Smart Power,
Southeast Asia

Abstract

Maintaining national defense is crucial for ensuring a state's sovereignty, territorial integrity, and the security of its population. As a pivotal figure in Southeast Asia, Indonesia is compelled to formulate a strategic defense policy that is robust and adaptable to changing regional circumstances. This study aims to examine the Southeast Asian geopolitical context within Indonesia's defense strategy, focusing on efforts to maintain sovereignty and regional stability in the region without resorting to direct military confrontation. This study employed qualitative research, utilizing observation and literature review as primary data collection methods. Results indicate that Indonesia's defense strategy employs a variant of smart power, characterized by a blend of military modernization and the forging of strategic alliances, institutional strengthening, and regional cooperation. This multidimensional approach improves Indonesia's defense posture while advancing diplomatic engagement and trust-building with

other states in the region. As a result, the study asserts that the smart power approach strengthens national defense capabilities and improves the prospects for regional peace and security.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pertahanan negara kini menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks dinamika geopolitik yang rumit di Asia Tenggara. Kawasan ini adalah wilayah strategis yang berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional utama, tetapi juga menghadapi risiko konflik perbatasan, sengketa maritim, dan ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, serta masalah keamanan siber. Meskipun kawasan ini relatif stabil dan tidak mengalami perang terbuka antarnegara, ketegangan yang ada menunjukkan perlunya strategi pertahanan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan keamanan regional. Dalam hal ini, strategi pertahanan tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup pendekatan diplomatik, ekonomi, dan kelembagaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek pertahanan di Asia Tenggara, terutama peran ASEAN dalam membangun komunitas politik-keamanan kawasan (Acharya, 2014) dan dinamika rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Goh, 2017). Tak jauh berbeda, penelitian serupa telah dipublikasikan oleh Didik Prihartono (2022) dalam jurnal Kewarganegaraan dengan judul *Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan karya Didik Prihartono adalah bahwa fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda. Penelitian ini berfokus pada strategi pertahanan Indonesia yang digunakan Indonesia untuk menjaga keamanan nasional di Asia Tenggara dengan pendekatan smart power.

Sementara penelitian Prihartono (2022) berfokus pada dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ini juga berkaitan dengan peran diplomasi Indonesia dalam menjaga pertahanan secara bilateral dan multilateral melalui kerangka ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). Adapun tulisan ini bertujuan untuk melihat strategi pertahanan Indonesia menggunakan smart power dalam menjaga keamanan negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana Indonesia menganalisis ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana pendekatan smart power dapat membantu menangani ancaman tersebut. Penggunaan smart power diharapkan meningkatkan kemampuan militer, sekaligus membangun aliansi maupun kemitraan, dan kemampuan membangun institusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dengan pendekatan smart power. Kami akan menyelidiki kombinasi antara modernisasi militer, penguatan diplomasi, dan pembangunan

institusi keamanan. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana strategi tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas kawasan tanpa memicu konflik terbuka. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi keamanan non-konvensional dan juga praktis dalam perumusan kebijakan pertahanan Indonesia di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam bagaimana Indonesia merumuskan strateginya dalam pertahanan, dengan menerapkan pendekatan smart power dalam konteks geopolitis Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dihadapi tidak hanya bisa dipecahkan dengan angka atau data kuantitatif, tetapi juga membutuhkan eksplorasi terhadap makna, strategi, dan konteks di balik kebijakan pertahanan negara.

Metode kualitatif memberi peneliti kesempatan untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh, serta menangkap nuansa hubungan antara aktor, institusi, dan lingkungan strategis (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran dokumen resmi pemerintah (seperti White Paper Pertahanan Indonesia), jurnal akademik, serta artikel berita yang terpercaya untuk memahami praktik dan arah kebijakan pertahanan Indonesia.

Selain itu, para peneliti juga menerapkan metode observasi tidak langsung. Ini dilakukan melalui analisis media, pidato dari pejabat pertahanan, serta laporan mengenai kerja sama militer Indonesia, baik di tingkat bilateral maupun multilateral.

Data yang terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan penerapan strategi smart power dalam konteks pertahanan negara. Analisis ini juga memperhatikan faktor lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara yang dinamis dan kompleks, meskipun relatif stabil dalam hal konflik bersenjata antarnegara. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan pertahanan Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer (hard power), tetapi juga menekankan pentingnya diplomasi, kerja sama regional, dan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari strategi smart power.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asia Tenggara Sebagai Suatu Wilayah

Asia Tenggara adalah sebuah wilayah yang terletak di tenggara benua Asia. Penduduk di daerah ini dikenal sebagai keluarga Melayu. Seluruh kawasan Asia Tenggara berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, seperti Tiongkok di utara, Samudera Pasifik di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Teluk Benggala serta anak benua India di barat. Kawasan ini terkenal dengan aktivitas seismik (gempa

bumi) dan vulkanik (gunung berapi) yang tinggi, yang disebabkan oleh posisinya yang berada di pertemuan lempeng geologi (ASEAN, 2020).

Kawasan Asia Tenggara meliputi 11 negara, antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Timur. Negara-negara ini dibagi menjadi tiga kawasan: Indochina, Semenanjung Malaka, dan kepulauan di ujung Asia Tenggara (Tysara, 2022). Kawasan Asia Tenggara terdiri dari bentang alam daratan dan perairan. Bentuk permukaan merupakan bagian penting dalam kehidupan dan aktivitas penduduk. Pada saat yang sama, lanskap perairan terdiri dari air tawar dan air laut. Kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki bentang air tawar berupa sungai, danau, dan rawa. Sungai-sungai besar memiliki peran yang cukup penting, terutama bagi penduduk. Dengan air yang ada di sungai, bisa sebagai sumber air untuk berbagai keperluan hidup, perikanan, bahan tambang, lalu lintas, dan rekreasi.

Perairan di kawasan Asia Tenggara banyak dimanfaatkan untuk budidaya biota laut, seperti Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Utara, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Flores, Laut Maluku, Laut Arafura, Timor, Maro dan Sabum Maro. Teluk Asia Tenggara adalah Teluk Thailand di Myanmar selatan dan barat Thailand. Kemudian Teluk Tonkin di Thailand bagian timur serta Vietnam bagian selatan dan Kamboja(Gischa, 2020)..

Dikutip dari situs resmi ASEAN di asean.org, kawasan ASEAN mendominasi empat hotspot keanekaragaman hayati. Tiga dari 17 negara paling beragam di dunia adalah anggota ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara ASEAN mempunyai sumber daya yang relatif sama karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Namun setiap negara mempunyai sumber daya dan barang untuk kepentingannya masing-masing(ASEAN, 2020). Hal tersebut membuat kawasan Asia Tenggara mempunyai daya Tarik tersendiri. Kawasan Asia Tenggara mampu membuat negara lain menjadi tertarik akan kehadiran kawasannya. Kekayaan alam dan segala sumber daya yang ada di Asia Tenggara membuat keunikan tersendiri.

Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Asia Tenggara terus menarik perhatian para peneliti dari berbagai negara. Asia Tenggara memiliki beragam bahasa, seni, pengetahuan dan teknologi lokal, makanan dan pengobatan tradisional yang tidak pernah berhenti untuk dieksplorasi. Hal inilah yang membuat Asia Tenggara begitu menarik. Dibandingkan dengan negara lain khususnya Eropa dan Amerika, kawasan Asia Tenggara mempunyai nilai-nilai yang unik, salah satunya adalah harmoni atau nilai keharmonisan.

Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara

Hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang saling terkait dalam politik, ekonomi, dan keamanan, baik di antara negara-negara di kawasan ini maupun dengan aktor global. Kawasan ini dikenal karena keragaman sistem politik, latar belakang sejarah kolonial yang berbeda-beda, serta

kondisi sosial-ekonomi yang tidak seragam. Namun, meskipun ada banyak perbedaan, negara-negara Asia Tenggara telah berhasil membangun platform kerja sama regional yang cukup stabil, yaitu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)(ASEAN, 2020).

Menurut, stabilitas kawasan ini tidak ditentukan oleh dominasi kekuatan besar, tetapi oleh konsensus dan norma-norma yang dikembangkan oleh negara-negara anggotanya. Prinsip-prinsip seperti non-interference, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi pilar utama dalam hubungan antarnegara di Asia Tenggara (Acharya, 2014). Walaupun prinsip-prinsip ini sering kali dianggap menghambat respons cepat terhadap isu-isu penting seperti krisis di Myanmar atau konflik di Laut Tiongkok Selatan, mekanisme ini tetap mencerminkan karakter unik diplomasi kawasan yang menekankan harmoni dan stabilitas jangka Panjang.

Di sisi lain, ASEAN juga memainkan peran yang krusial sebagai penengah dalam berbagai ketegangan geopolitik di seluruh dunia. Kawasan ini menjadi pusat interaksi antara kekuatan besar, terutama dalam konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Banyak negara di Asia Tenggara yang memilih strategi luar negeri berbasis hedging, yaitu berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua belah pihak agar tidak terlibat langsung dalam konflik antara kekuatan besar(Goh, 2017). Strategi ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara bersifat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional serta stabilitas kawasan.

Secara ekonomi, kolaborasi regional terus tumbuh melalui inisiatif seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kedua mekanisme ini berperan penting dalam memperkuat integrasi ekonomi di kawasan, sekaligus menciptakan peluang kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara mitra di luar ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional di Asia Tenggara tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Dengan demikian, ASEAN berhasil menciptakan arsitektur ekonomi regional yang mampu menghubungkan berbagai rezim perdagangan dan investasi dengan tetap menjaga fleksibilitas antar negara anggotanya(Ravenhill, 2017).

Meski demikian, tantangan tetap ada. Sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, meningkatnya nasionalisme ekonomi, dan tekanan terhadap demokrasi menjadi beberapa isu utama yang dapat mengganggu kohesi regional. Namun, melalui pendekatan dialogis dan multilateral, kawasan ini tetap menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan pembangunan bersama. Di sinilah terlihat bahwa hubungan internasional di Asia Tenggara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan jangka pendek, tetapi juga oleh norma dan institusi yang telah dibangun selama lebih dari lima dekade terakhir.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan internasional di Asia Tenggara berkembang dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan nasional, solidaritas regional, dan tekanan global. Pendekatan yang mengutamakan

dialog, norma kolektif, dan kerja sama fungsional telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu contoh sukses regionalisme di dunia yang sedang berkembang.

Masalah dan Dinamika Keamanan di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara sedang menghadapi berbagai tantangan keamanan yang rumit dan beragam. Meskipun relatif lebih stabil dibandingkan dengan kawasan lain yang mengalami konflik terbuka, Asia Tenggara tidak sepenuhnya bebas dari risiko keamanan, baik yang tradisional maupun non-tradisional. Tantangan ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara secara terpisah, tetapi juga menguji kapasitas lembaga regional seperti ASEAN dalam mengelola keamanan secara kolektif.

Salah satu yang menjadi permasalahan keamanan di Asia Tenggara antara lain Sengketa wilayah di Laut China Selatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah ini, yang juga diklaim oleh beberapa anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Konflik ini sering memicu insiden antara angkatan laut negara-negara pengklaim dan China, serta meningkatkan risiko provokasi militer dan konflik berskala rendah hingga terbuka (Roza dkk., 2013). Perselisihan ini melibatkan klaim wilayah yang tumpang tindih antara China dan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. China mengklaim hampir seluruh kawasan melalui nine-dash line, garis imajiner yang tidak diakui dalam hukum internasional. Pada tahun 2016, Permanent Court of Arbitration di Den Haag menyatakan bahwa klaim China tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), namun China menolak putusan itu dan terus membangun instalasi militer di wilayah sengketa (Buszynski & Sazlan, 2017). Kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok ini justru menambah ketegangan di Kawasan Asia Tenggara.

Selain masalah sengketa wilayah maritim di Laut China Selatan, Asia Tenggara juga berhadapan dengan ancaman non-tradisional yang sangat mendesak, yaitu terorisme dan radikalisme kekerasan. Jika konflik di Laut Tiongkok Selatan mencerminkan ketegangan antarnegara dan persaingan geopolitik, ancaman terorisme lebih bersifat transnasional dan menyebar melalui jaringan bawah tanah yang melintasi negara. Terorisme di Asia Tenggara tidak hanya mengganggu stabilitas domestik, tetapi juga merusak kerja sama regional dalam keamanan (Tan, 2016). Peristiwa-peristiwa besar seperti Bom Bali pada tahun 2002, pengepungan Marawi di Filipina pada 2017, serta aktivitas kelompok Abu Sayyaf dan afiliasi ISIS menjadi bukti bahwa kawasan ini masih rentan terhadap penyebaran ideologi ekstrem. Oleh karena itu celah pengawasan di wilayah perbatasan, urbanisasi tanpa inklusi sosial, dan penyebaran radikalisme berbasis media sosial telah mempercepat proses radikalisasi individu maupun kelompok.

Selain ancaman terorisme dan radikalisme, kawasan Asia Tenggara juga bergulat dengan berbagai bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang seringkali saling berkaitan dan memperkuat jaringan ekstremisme kekerasan. Kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, senjata ilegal, hingga pencucian

uang, tidak hanya mengancam stabilitas dalam negeri masing-masing negara tetapi juga melemahkan efektivitas penegakan hukum lintas batas. Banyak jaringan teroris yang memperoleh dana dan logistik dari hasil aktivitas kriminal terorganisir, menunjukkan bahwa dimensi kejahatan dan ekstremisme tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol perbatasan, disparitas penegakan hukum, dan keterbatasan kerja sama intelijen, sehingga membuat kawasan Asia Tenggara menjadi ladang subur bagi aktivitas kriminal lintas negara (Emmers, 2003).

Asia tenggara harus fokus dalam menghadapi terorisme, sentralitas atau persatuan di Kawasan Asia Tenggara. Selama ini masalah utama yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara adalah kedekatan geografis, masalah politik yang timbul dari ketegangan sosio-kultural dan nasionalisme yang mewarnai kebijakan ekonomi maupun proses pengambilan keputusan. Dalam batas-batas tertentu, determinan-determinan itu memiliki sifat makna ganda. Kedekatan geografis, misalnya, dapat berperan sebagai kekuatan integratif karena memberi peluang yang lebih besar bagi terselenggaranya interaksi dan interkomunikasi antar negara. Pada saat yang sama, terutama jika disertai pula oleh ketidakjelasan tapal batas antar-negara, kedekatan geografis justru menimbulkan persoalan yang mungkin mengawali disintegrasi suatu wadah kerja sama regional.

Di samping persoalan-persoalan internal, selama ini persepsi ancaman ekstern dari para anggota ASEAN masih berbeda-beda. Bahwa ada perubahan persepsi keamanan di kawasan, khususnya menghadapi ancaman terorisme dengan jaringan global, memang merupakan sebuah kenyataan baru dalam tata hubungan regional sekarang ini. Persoalannya, pola menghadapi terorisme masih berbeda-beda. Demikian juga persepsi terjadinya ancaman terhadap negara-negara di Asia Tenggara juga masih berbeda-beda. Indonesia selalu memproyeksikan ancaman terhadap wilayahnya datang dari utara. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi Chinalah yang dianggap sebagai ancaman (Emmers, 2003). Oleh karena itu Indonesia menyebutkan Vietnam sebagai penyangga (buffer) antara RRC dengan Indonesia.

Padahal Thailand, yang berbatasan langsung dengan Indocina ketika masih didominasi Vietnam, justru menganggap China sebagai pelindung menghadapi Vietnam. Walaupun Vietnam dan Laos telah menjadi anggota ASEAN, tetapi tampak bahwa negara itu masih mengandalkan China sebagai pelindung (Zhang, 2015). Singapura dan Malaysia lain lagi. Di samping keduanya bersaing di antara mereka sendiri dalam batas-batas tertentu, baik masalah Pulau Batu Puteh, masalah stasiun kereta api, dan masalah pasokan air minum ke Singapura, dan kedua negara itu masih menyimpan kekhawatiran terhadap Indonesia, akibat politik konfrontasi yang dijalankan Indonesia di masa lalu. Akibatnya tidak jarang ulah Singapura dan Malaysia memancing munculnya rasa kesal pada beberapa kalangan di Indonesia. Salah satunya adalah masih dilanjutkan kerja sama pertahanan antara Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Inggris dalam Five Power Defence Arrangement (FPDA).

Masih dipertahankannya FPDA yang dibentuk tahun 1971 pada saat ASEAN telah berusia lebih dari empat dasawarsa, menimbulkan rasa tidak suka pada beberapa kalangan Indonesia (Acharya, 2014). Sebab, Indonesia menganggap FPDA itu dibentuk untuk mengamankan posisi Singapura dan Malaysia dari kemungkinan ancaman Indonesia, yang dimasa sebelumnya memperlihatkan menjalankan politik luar negeri yang agresif.

Strategi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Terlepas dari perubahan tujuan ASEAN, Indonesia tetap perlu mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. Meski peran dominan Indonesia menurun di awal era reformasi, namun Indonesia tetap dipandang sebagai mesin utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik untuk mengarahkan kepentingannya secara internasional (Sukma, 2009). Jika Indonesia masih ingin memperjuangkan integrasi kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus fokus memperkuat organisasi pasar bebas di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia harus menggerakkan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN untuk menciptakan budaya berbagi, seperti melaksanakan pertukaran pelajar di kawasan Asia Tenggara melalui program Erasmus di kawasan Uni Eropa. Dalam pelaksanaan integrasi ekonomi dan sosial budaya, integrasi regional lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan pemberitaan masalah politik dan keamanan secara permanen.

Masalah pertahanan tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja, banyak sekali hal yang harus diperhatikan dan dijaga oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia (Maulidia, 2024). Indonesia merupakan negara yang memiliki peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara, namun hal tersebut tidak boleh membuat Indonesia lengah. Pertahanan negara lainnya walaupun masih dibawah Indonesia namun bukan berarti tidak dapat melampaui Indonesia. Indonesia tetap harus mempertahankan kekuatannya di kawasan Asia Tenggara demi menjaga kedaulatan negaranya.

1. Penggunaan “Smart Power”

Smart power adalah kekuasaan (power) berbasis pada kemahiran dan atau seni sebuah entitas politik untuk memanipulasi praktek penggunaan hard power dalam konteks soft power dalam rangka mencapai tujuan tertentu, "melibatkan penggunaan strategi diplomasi, persuasi, peningkatan kapasitas, dan proyeksi kekuasaan dan membangun pengaruh (influence building) melalui cara bertindak yang hemat biaya, namun memiliki legitimasi politik dan sosial. dengan smart power, persuasi, promosi dan diplomasi akan menjadi garda terdepan setiap kebijakan dalam dan luar negeri. Pada konteks ini ada hubungan langsung antara soft power dan hard power.

Nye berpendapat bahwa, negara-negara yang “pintar” dapat meningkatkan kredibilitas dan kapasitas soft power mereka dengan kinerja domestik dan internasional mereka. Realitas hubungan internasional pada saat ini memperlihatkan

bahwa perlu untuk menggunakan soft power dan hard power secara bersamaan, daripada secara terpisah, hard power dan soft power sering berinteraksi satu sama lain dan saling menguatkan. Keduanya akhirnya terkait karena mereka berdua mewakili kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempengaruhi perilaku orang lain dan, dengan demikian, saling terkait (Nye, 2004). Kemampuan untuk secara cerdas menggabungkan kekuatan hard dan soft untuk pengembangan strategi terintegrasi disebut smart power (Armitage & Nye, 2007).

Berbeda dengan pendekatan hard power yang lebih mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi secara koersif, atau soft power yang berfokus pada daya tarik budaya, nilai-nilai, dan diplomasi, smart power menekankan pentingnya memilih instrumen kekuatan yang tepat sesuai dengan konteksnya (Wilson, 2008). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan smart power terlihat dalam penguatan kemampuan militer bersamaan dengan pembangunan institusi demokrasi, peningkatan peran diplomatik di kawasan, serta penguatan kerja sama multilateral. Pendekatan ini dianggap efektif untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama di Asia Tenggara yang memiliki dinamika geopolitik yang kompleks, sambil menghindari konflik bersenjata yang terbuka.

2. Strategi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Menggunakan *Smart Power*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Realitas hubungan internasional pada saat ini memperlihatkan bahwa perlu untuk menggunakan soft power dan hard power secara bersamaan, daripada secara terpisah. Kemampuan untuk secara cerdas menggabungkan kekuatan hard dan soft untuk pengembangan strategi terintegrasi yang dilakukan secara defensif aktif itulah smart power yang digunakan Indonesia. Indonesia mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global. Melalui pendekatan strategi pertahanan smart power yang merupakan kombinasi yang sinergis antara pembangunan kekuatan hard power (Rakyat Plus TNI/Alutsista Tri-matra) dan kekuatan soft power (mindset dan diplomasi pertahanan kawasan) yang berlandaskan kekuatan nilai-nilai idealisme hati nurani dan jati diri bangsa.

Pertahanan negara Indonesia ke luar bersifat defensif aktif, tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam, Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain (Menhan, 2012). Pembangunan pertahanan negara dirancang untuk melindungi kekuatan maritim regional yang disegani dari Asia Tenggara hingga Asia Pasifik melalui prinsip pertahanan aktif demi kepentingan nasional. Dengan mempertahankan kepentingan nasional, pertahanan defensif aktif tidak agresif dan tidak ekspansif.

Pertahanan defensif aktif dilakukan melalui diplomasi dan politik luar negeri bebas aktif. Karena fakta bahwa perang akan menyebabkan penderitaan bagi rakyat, penyelesaiannya harus dicapai melalui cara politik yang persuasif dengan meningkatkan upaya diplomatik.

Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman militer, dilakukan melalui diplomasi untuk mencegah niat negara lain menyerang atau mengancam kepentingan nasional (Menhan, 2012). Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya digunakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami kegagalan. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi strategis yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan negara. Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman nonmiliter oleh dalam atau luar di luar bidang pertahanan dilakukan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan.

Penyusunan wilayah negara sebagai medan pertahanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh berbagai lembaga dan organisasi, yang dihasilkan melalui penetapan ruang pertahanan. Selain itu, dalam atau luar juga menyiapkan dukungan logistik pertahanan yang cepat dan terpadu melalui pembangunan nasional untuk kepentingan keamanan. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran yang menggabungkan ancaman militer dan nonmiliter, dan segenap komponen pertahanan negara berkolaborasi untuk melakukan pertahanan defensif aktif terhadap ancaman hibrida.

Strategi pertahanan berlapis menggabungkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi berbagai jenis ancaman (Menhan, 2012). Strategi ini menggunakan pertahanan bersifat defensif aktif dan semesta, dengan fokus pada pertahanan negara secara utuh dan saling mendukung dalam mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Secara konkret, implementasi smart power Indonesia tercermin dalam kombinasi antara peran aktif dalam misi perdamaian dunia (seperti kontribusi TNI dalam UN Peacekeeping Operations), diplomasi kebudayaan, dan partisipasi dalam institusi regional seperti ASEAN. Di ranah militer, Indonesia tidak hanya memperkuat postur pertahanannya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga memperkuat hubungan pertahanan melalui latihan bersama seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) dan Super Garuda Shield bersama Amerika Serikat dan negara mitra lainnya.

Sementara di sisi soft power, Indonesia mempromosikan inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan kerja sama inklusif, dialog damai, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, melainkan juga memperkuat posisi normatifnya di kawasan (Setyorini, 2022).

Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, Indonesia menekankan pentingnya supremasi hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), sebagai soft power normatif. Indonesia tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok yang menggunakan nine-dash line, khususnya ketika hal tersebut bertentangan dengan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Untuk menegaskan posisi ini, Indonesia menggunakan hard power

terbatas melalui patroli militer dan pengerahan kapal TNI AL, tetapi tetap diiringi dengan jalur diplomasi yang menekankan pentingnya dialog damai dan sentralitas ASEAN. Pendekatan ini terlihat dalam penyusunan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang menekankan inklusivitas dan keterlibatan tanpa konfrontasi (Setyorini, 2022).

Sementara itu, dalam isu terorisme—khususnya pasca munculnya jaringan teroris transnasional di Asia Tenggara seperti ISIS-K dan Jemaah Islamiyah—Indonesia menerapkan strategi smart power dengan memperkuat kerangka hukum dan kapasitas militer, sembari membangun kerja sama deradikalisasi dan pertukaran intelijen. Upaya ini tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia dalam forum seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) serta pembentukan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga (ASEAN, 2019). Di samping itu, program deradikalisasi berbasis masyarakat, pendidikan damai, dan penguatan narasi keagamaan moderat menjadi bagian penting dari soft power yang dibangun Indonesia dalam menghadapi ekstremisme kekerasan di tingkat domestik dan regional.

Melalui pendekatan smart power dalam dua isu strategis tersebut, Indonesia memperlihatkan kapasitasnya untuk menjadi aktor regional yang adaptif, normatif, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas kawasan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara tidak hanya dibentuk untuk memperkuat aspek militer, tetapi juga untuk menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas kawasan. Dengan menerapkan konsep smart power, Indonesia menggabungkan kekuatan keras, seperti modernisasi militer, dengan kekuatan lunak yang mencakup diplomasi, penguatan institusi, dan kerja sama multilateral. Penelitian ini menjawab tujuan utama, yaitu menganalisis bagaimana strategi pertahanan Indonesia dirancang untuk menghadapi tantangan keamanan kawasan tanpa harus bergantung pada konfrontasi terbuka. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas regional tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada ketepatan diplomasi dan pengelolaan ancaman non-tradisional secara kolaboratif. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif lintas negara ASEAN dalam penerapan smart power sebagai strategi pertahanan, serta eksplorasi lebih dalam mengenai respons kebijakan Indonesia terhadap ancaman hibrida, termasuk siber dan disinformasi. Beberapa penelitian saat ini sedang berlangsung dalam kerangka kebijakan keamanan digital dan pertahanan maritim berbasis teknologi, yang dapat menjadi dasar baru dalam merumuskan strategi pertahanan yang lebih adaptif di masa depan.

REFERENSI

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). Routledge.
- ASEAN. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. <https://asean.org/book/asean-outlook-on-the-indo-pacific/>
- ASEAN. (2020). Sekretariat Nasional ASEAN. <https://setnasasean.id/news/read/daftar-negara-negara-di-kawasan-asia-tenggara-dan-bentuk-pemerintahannya>
- Buszynski, L., & Sazlan, I. (2017). Maritime claims and energy cooperation in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 143–171. <https://doi.org/10.1355/cs29-1g>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emmers, R. (2003). Transnational crime and the security of Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 226–245. <https://doi.org/10.1355/CS25-2E>
- Gischa, S. (2020). Kondisi Geografi Asia Tenggara: Luas dan Bentangnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/180000369/kondisi-geografi-asia-tenggara-luas-dan-bentangnya>.
- Goh, E. (2017). Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing regional security strategies. *International Security*, 113–157.
- Maulidia, A. N. (2024, Juli 6). Top 5 ASEAN's Strongest Military in 2024. https://news.seatoday.com/id/aqilla-nasyia-maulidia/6203/top-5-aseans-strongest-military-in-2024?utm_source=chatgpt.com
- Menhan. (2012). Kemampuan meningkatkan 'smart power', 'hard power' dan 'soft power.' <https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/menhan-kemampuan-meningkatkan-smart-power-hard-power-dan-soft-power.html>
- Nye, J. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Ravenhill, J. (2017). *Global political economy* (5th ed.). Oxford University Press. Oxford University Press.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KAWASAN. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Setyorini, I. D. (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP). Universitas Brawijaya, Vol. 9 No. 2 [2022](Jurnal Transformasi Global).
- Sukma, R. (2009). *Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: Searching for Autonomy*. Routledge.
- Tan, A. T. H. (2016). *Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*. Edward Elgar Publishing.
- Tysara, L. (2022). Negara Apa Saja yang Masuk Wilayah Asia Tenggara. <https://www.liputan6.com/hot/read/5154486/negara-apa-saja-yang-masuk-wilayah-asia-tenggara-ini-11-di-antaranya>

- Wilson, E. J. I. (2008). Hard power, soft power, smart power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 110–124.
- Zhang, X. (2015). China–Vietnam relations: A delicate balance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34(1), 37–63.
<https://doi.org/10.1177/186810341503400102>